









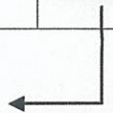


**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

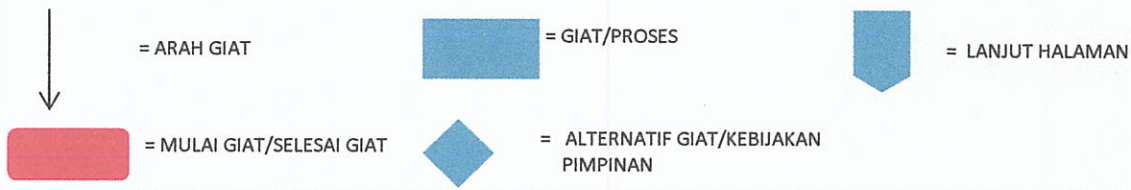
	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE – SOP)	
	PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN KENDARAAN DINAS	
	DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BARESKRIM POLRI	
NO. DOKUMEN SOP-DIT-TIPIDKOR- XXX	NO. REVISI :	JANUARI 2018

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
		DIR	ATPM	PARA PEMEGANG KENDARAAN	KSBG RENMIN	KAURKEU			
1	Dirtipidkor mengundang ATPM untuk Rapat Pembahasan tentang Kontrak Harwat Kendaraan Dinas.						Undangan Rapat	1.5 jam	-
2	Pembuatan dan Penandatanganan Kontrak Harwat Kendaraan Dinas antara ATPM dengan Dittipidkor						Dokumen Perjanjian Kontrak	1 Jam	Kesepakatan Kontrak
3	Sosialisasi Kontrak Harwat Kendaraan Dinas kepada Pemegang Kendaraan						Materi tentang Ketentuan Harwat	1 Jam	-
4	Pemegang Kendaraan melakukan estimasi untuk harwat Kendaraan Dinas pada Bengkel yang ditunjuk sesuai kontrak untuk mengetahui Biaya yang dibutuhkan						Rincian Estimasi	2 jam	Estimasi Harga dari ATPM, Nota Dinas
5	Pemegang Kendaraan Dinas Dittipidkor membuat Nota Dinas kepada Dirtipidkor perihal Anggaran dan Harwat Kendaraan Dinas sesuai biaya estimasi yang dibuat oleh bengkel						Nota Dinas	1 Jam	Disposisi Direktur
6	Dirtipidkor mendisposisi Kepada Kasubbagrenmin untuk memproses sesuai anggaran yang telah ditentukan						Disposisi Direktur	1 Jam	Nota dinas berikut RAB Pengajuan Anggaran
7	Subbagrenmin membuat Persetujuan biaya Harwat Kendaraan Dinas						Disposisi	1 jam	-



8	Pemegang Kendaraan Dinas membawa Kendaraannya ke Bengkel						Kendaraan	1 Jam	-
9	Bengkel ATPM mengirimkan Tagihan kepada Ddirtipidkor perihal Biaya Harwat Kendaraan						Tagihan dari ATPM	1 Jam	-
10	Dirtipidkor mendisposisi kepada Kaurkeu urntuk membayar Biaya Harwat Kendaraan Dinas.						Disposisi Dirtipidkor	1 Jam	Kwitansi Pembayaran

KETERANGAN :



Jakarta, Desember 2018

DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI



ERIKANTO KURNIADI, S.H., M.H
BRIGADIR JENDERAL POLISI